

MASTERPLAN

RENCANA AKSI DAERAH

PANGAN DAN GIZI

(RAD-PG)

TAHUN 2023-2028



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam rangka perwujudan pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025) memberikan arah pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sejahtera melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan faktor penentu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia dalam percaturan global. Peningkatan kualitas SDM tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera, dan pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi peningkatan kualitas SDM.

Upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi, juga akan mendukung komitmen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada sasaran tahun 2019, yaitu: (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera. (12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab.

Pangan dan Gizi berkaitan erat dengan pembangunan suatu bangsa. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas faktor penentu peningkatan produktivitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan daya saing bangsa Indonesia dalam percaturan global. Masalah gizi berdampak fatal bagi kehidupan. Kekurangan gizi



berpengaruh negatif terhadap pembangunan mental, perkembangan fisik, produktivitas. Masalah gizi di Indonesia bermafestasi gizi kurang dan gizi lebih serta kekurangan zat gizi mikro. Munculnya beban ganda masalah gizi (Triple Burden of Malnutrition) menambah permasalahan pembangunan SDM suatu bangsa. Kompleksitas faktor penyebab masalah gizi, disparitas pencapaian pembangunan, perhatian pemerintah terhadap gizi dan kesehatan masyarakat di dalam era otonomidaerah (OTDA), berpengaruh terhadap upaya perbaikan gizi. Untuk itu diperlukan dukungan seluruh stakeholder baik pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha terjalin dalam konvergensi.

RAD-PG tidak sekedar mengkompilasi dokumen perencanaan yang sudah ada, tetapi berisikan penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN 2020-2024 dan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memberikan penajaman aksi terhadap prioritas kegiatan yang telah ditentukan, sehingga dapat diacu oleh pemerintah terutama perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan di bidang pangan dan gizi. Selain itu, RAD-PG dapat digunakan sebagai piranti advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi.

Akhirnya kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Mojokerto beserta jajaran di pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bappeda, Para Kepala Dinas (OPD) yang telah mengizinkan dan mendukung penyusunan RAD-PG ini. Akhirnya tiada gading yang tak retak, karenanya kami mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyusunannya masih banyak ketidak sempurnaan, semata mata kealpaan kami. Semoga RAD-PG ini bermanfaat dalam pembangunan SDM Kabupaten Mojokerto yang unggul di tahun mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>iii</i>
BAB I.....	<i>1</i>
PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	<i>1</i>
B. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.....	<i>2</i>
C. Tujuan Penyusunan.....	<i>4</i>
D. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG.....	<i>5</i>
BAB II.....	<i>6</i>
ANALISIS SITUASI.....	<i>6</i>
A. Situasi Saat Ini.....	<i>6</i>
BAB III.....	<i>18</i>
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.....	<i>18</i>
A. Tujuan dan Sasaran.....	<i>18</i>
B. Ruang Lingkup.....	<i>18</i>
C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....	<i>19</i>
BAB IV.....	<i>22</i>
PELAKSANAAN RENCANA AKSI.....	<i>22</i>
A. Strategi dan Aksi.....	<i>22</i>
B. Pengorganisasian.....	<i>31</i>
C. Peran Sektor Non-Pemerintah.....	<i>31</i>
D. Pembiayaan.....	<i>32</i>
BAB V.....	<i>33</i>



PEMANTAUAN EVALUASI DAN LAPORAN	33
A. <i>Pemantauan dan Evaluasi</i>	33
B. <i>Pelaporan</i>	33
BAB VI	34
PENUTUP	34
<i>Lampiran 1. Matriks Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2028</i>	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan dan gizi memegang peranan sentral dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai aspek utama kebutuhan manusia, pangan yang seimbang dan gizi yang mencukupi menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan intelektual individu. Selain itu, makanan yang bergizi juga berkontribusi pada daya tahan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan kualitas dan harapan hidup, serta memperkuat ketahanan ekonomi suatu bangsa dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan memperhatikan pangan dan gizi, negara dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan potensi SDM dalam menghadapi tantangan global pada masa depan.

Saat ini, ketahanan pangan dan gizi tidak hanya berorientasi pada ketahanan pangan dan kesehatan saja, tetapi perlu juga memperhatikan aspek multisektor. Dengan menyediakan pangan yang seimbang dan gizi yang mencukupi, terutama pada masa kehamilan dan pertumbuhan anak-anak, kita dapat memastikan bahwa generasi muda mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan intelektual yang optimal. Kekurangan gizi kronis dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan stunting, yang berdampak negatif pada kemampuan anak untuk mencapai potensi penuh mereka.

Masalah Triple burden malnutrition adalah tiga masalah gizi yang disebabkan oleh kurang tepatnya perolehan nutrisi oleh suatu individu meliputi, kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kurangnya zat gizi penting. Hal ini merupakan tantangan serius bagi kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Kekurangan gizi dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sedangkan kelebihan gizi cenderung dialami oleh



individu yang memiliki akses mudah terhadap makanan yang tinggi lemak dan gula. Kurangnya zat gizi penting seperti vitamin dan mineral dapat terjadi pada kelompok masyarakat yang mengonsumsi makanan yang rendah nutrisi. Oleh karena itu, perlunya upaya yang komprehensif dalam penanganan triple burden malnutrition agar dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut World Bank, Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang bermula sejak saat konsepsi hingga anak berusia 2 tahun, merupakan masa paling kritis untuk memperbaiki perolehan nutrisi yang tepat serta perkembangan suatu individu. Status gizi ibu hamil dan ibu menyusui, status kesehatan dan asupan gizi yang baik merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif anak, menurunkan risiko kesakitan pada bayi dan ibu. Ibu hamil dengan status gizi kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, penyebab utama terjadinya bayi pendek (stunting) dan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit degeneratif pada masa dewasa. Oleh karena itu, investasi pada pangan dan gizi yang baik merupakan langkah penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berpotensi, serta dalam mengurangi angka stunting dan mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

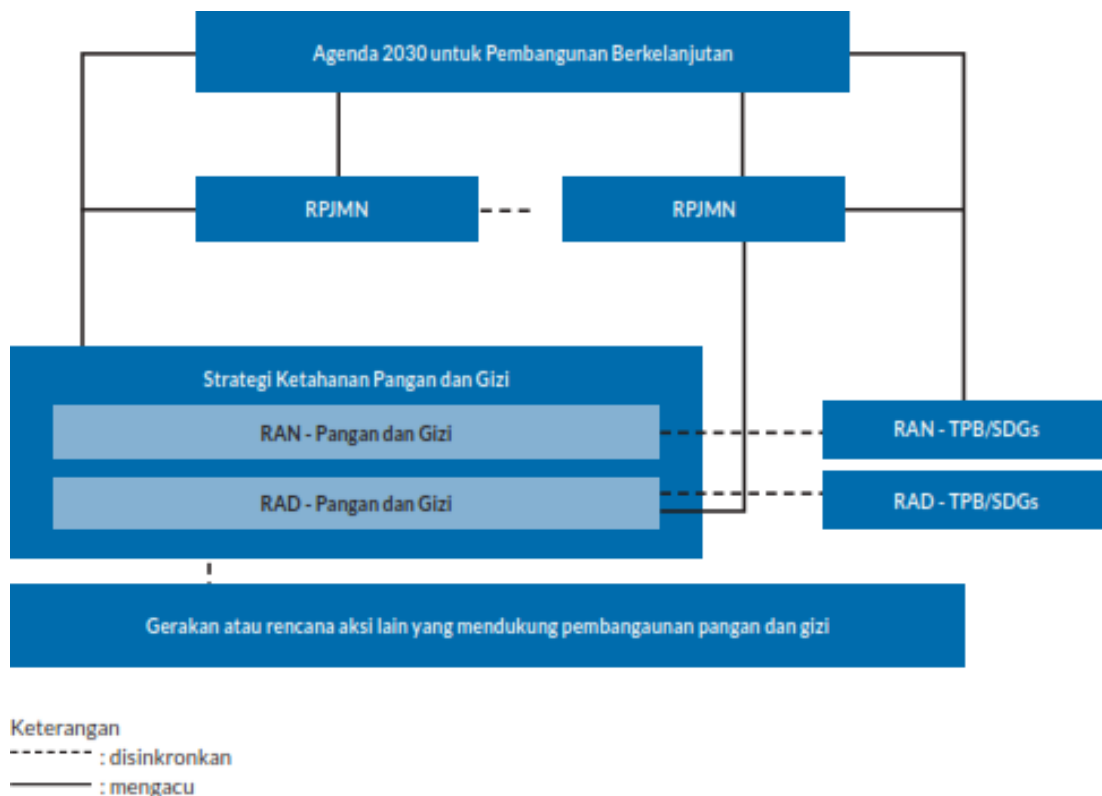
B. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan pangan dan gizi memerlukan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (integrated), terukur (measurable) dan berkelanjutan (sustainable). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG merupakan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan yang lebih efektif dan berdasarkan situasi yang ada. RAD-PG juga merupakan alat advokasi untuk mengkomunikasikan pentingnya peran pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, serta sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.



Sebagai bentuk penyesuaian dari perencanaan pusat dan daerah, maka kedudukan RAD-PG Di daerah Sama dengan RAN-PG Di pusat. Penyusunan RAD-PG disesuaikan dengan kebutuhan Dan keadaan daerah, sejalan dengan RAN-PG, Dan RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut. Maka dapat dinyatakan bahwa kedudukan RAD-PG :

1. RAD-PG Multisektor sama dengan RAN-PG Multisektor
2. RAD-PG Multisektor harus sejalan dengan RAN-PG, Dan RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto
3. RAD-PG menjadi strategi khususnya pada Pembangunan Pangan serta Peningkatan Kualitas SDM.



Gambar 1.1 Kedudukan RAD-PG Dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN 2020-2024 dan TPB/SDGs

Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 1 yang menunjukkan RAD-PG menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-



2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan Stunting, Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG).

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menyusun Analisis kebijakan (Draft/Bahan Rancangan Kebijakan) Daerah tentang Pangan Dan Gizi sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang.

Secara Umum Penyusunan Analisis Kebijakan RAD-PG bertujuan untuk

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar mampu menetapkan prioritas penanganan masalah Pangan Dan Gizi, memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan daerah, membangun Dan memfungsikan lembaga Pangan Dan Gizi secara optimal, serta melakukan pemantauan Dan evaluasi Pembangunan Pangan Dan Gizi
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.



D. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

Adapun dasar hukum penyusunan RAD-PG yaitu :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



BAB II

ANALISIS SITUASI

A. Situasi Saat Ini

➤ Bidang Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto

Jumlah penduduk yang tinggi dapat berdampak langsung pada produksi pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Semakin banyak penduduk, semakin besar permintaan akan pangan, sehingga diperlukan produksi pangan yang lebih besar pula. Di sisi lain, produksi pangan yang cukup dan berkualitas juga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan penduduk. Jika produksi pangan tidak dapat memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah, dapat timbul masalah kelaparan dan malnutrisi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dan efisien menjadi sangat penting guna memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan populasi.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	570899	584209	589783	566340	563550



Perempuan	562884	575384	580965	558212	580965
Total	1133783	1159593	1170748	1124552	1144515

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2021, jumlah penduduk mengalami penurunan, hal ini dapat disebabkan oleh dampak pandemi COVID 19 pada tahun 2020 terhadap jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto.

2. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan erat dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan. Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan berdampak negatif bagi kualitas lahan dan produktivitas lahan khususnya di bidang pertanian. Hal ini akan memberikan efek bagi ketahanan pangan.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mojokerto

Penggunaan Lahan	Hektar
Lahan Sawah	36.323
Lahan Bukan Sawah	35.152
Lahan Non-Sawah	26.315
Jumlah	97.790

Sumber : *BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021.*

Dari tabel di atas diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mojokerto ialah lahan non pertanian. Aktivitas non pertanian meliputi perindustrian, perdagangan dan jasa, pendidikan dan lainnya. Sedangkan untuk luasan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh lahan pertanian dan hutan.



3. Produksi Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan merupakan aspek krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Mojokerto. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi-ubian menjadi sumber utama karbohidrat dan energi bagi manusia. Sedangkan kacang-kacangan seperti kedelai dan kacang tanah dapat memenuhi kebutuhan protein nabati bagi manusia.

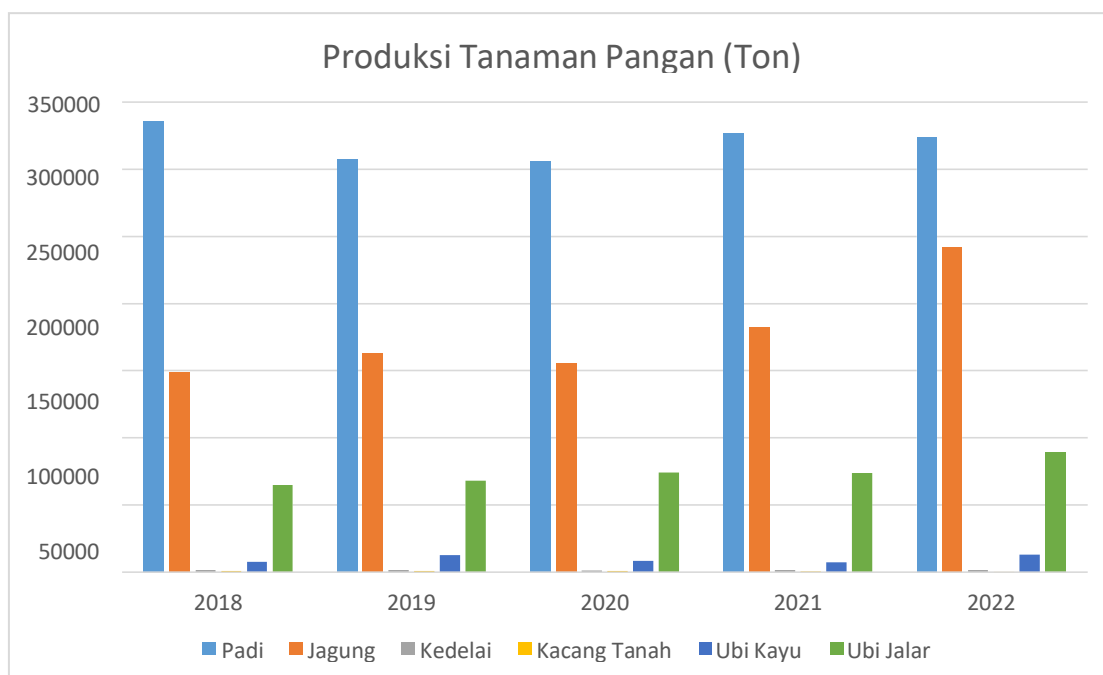
Tabel 2.3 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Mojokerto

Komoditas	Produksi Tanaman Pangan				
	Produksi Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	335944.304	307469.770	305874.163	326665.919	324230.371
Jagung	148837.030	162798.126	155838.808	182002.993	242084.560
Kedelai	1575.708	1602.399	1263.498	1739.645	1622.787
Kacang Tanah	1093.540	766.539	978.620	680.718	321.749
Ubi Kayu	7738.467	12693.302	8343.787	7475.186	13183.646
Ubi Jalar	65024.604	68121.626	74089.596	74033.446	89256.851

Sumber : Satudata Palapa



Gambar 2.1 Grafik Produksi Tanaman Pangan (Ton) di Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan data yang diperoleh, Padi merupakan tanaman pangan dengan produksi tertinggi di kabupaten Mojokerto. Produksi padi tertinggi pada tahun 2018 dan yang terendah pada tahun 2020. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sedangkan tanaman pangan lain cenderung mengalami peningkatan produksi yang konsisten sejak tahun 2018.

4. Produksi Buah-buahan

Produksi buah-buahan memiliki peran penting dalam menyediakan asupan gizi yang sehat bagi manusia. Buah-buahan kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, produksi buah-buahan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan penghidupan petani. Buah-buahan menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional dan dapat menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. Mendorong produksi buah-buahan yang berkelanjutan dan beragam dapat membantu mengurangi risiko kekurangan gizi dan penyakit terkait diet yang tidak seimbang.



Masyarakat perlu didorong untuk mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan guna memenuhi kebutuhan gizi harian dan menjaga kesehatan secara menyeluruh.

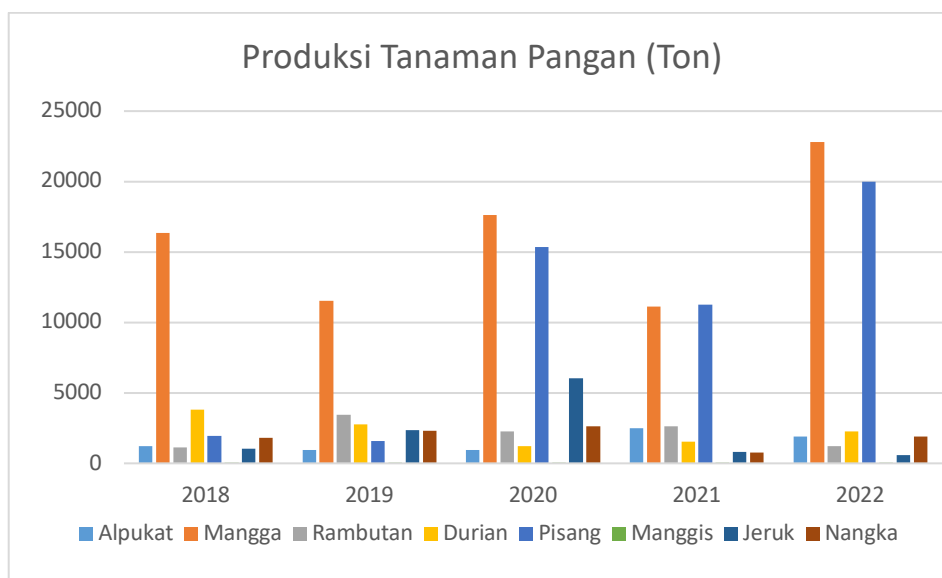
Tabel 2. 4 Produksi Buah-buahan di kabupaten Mojokerto

Komoditas	Produksi Buah-buahan (Source: Satudata Palapa)				
	Produksi Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Alpukat	1217.717	928.901	942.037	2504.166	1881.229
Mangga	16344.770	11545.925	17633.500	11127.899	22809.329
Rambutan	1146.625	3440.291	2287.025	2650.620	1203.685
Durian	3807.983	2771.570	1225.210	1525.685	2247.975
Pisang	1926.009	1567.770	15366.145	11281.372	19995.855
Salak	1033.730	227.220	134.350	168.385	217.652
Manggis	18.600	6.200	6.100	2.200	3.000
Nangka	1811.311	2302.004	2648.050	747.317	1894.524
Jeruk	1049.695	2341.542	6048.880	823.312	567.254

Sumber : Satudata Palapa



Gambar 2.2 Grafik Produksi Buah-buahan (Ton) di Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan data yang diperoleh, Produksi buah-buahan didominasi oleh produksi buah Mangga dengan produksi tertinggi pada tahun 2022. Produksi buah mengalami tren yang tidak pasti setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi suhu maupun iklim hingga permintaan pasar yang tidak menentu sehingga yield yang dihasilkan juga tidak menentu.

5. Produksi Hasil Ternak

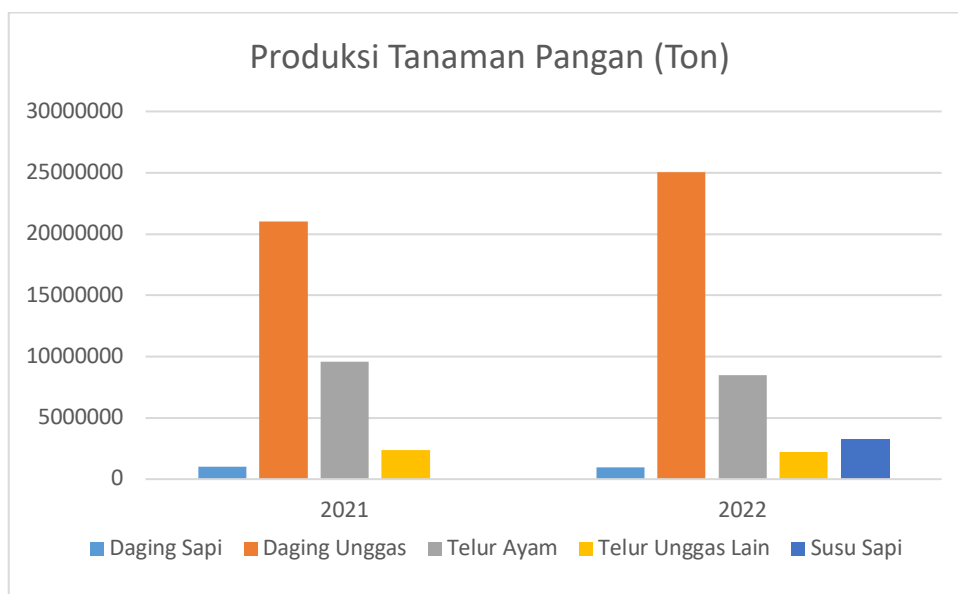
Produksi hasil ternak memiliki peran penting dalam menyediakan sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia. Daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya dari hasil ternak mengandung nutrisi esensial seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selain itu, produksi hasil ternak juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Peternakan sebagai sektor industri memberikan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, produksi hasil ternak yang berkelanjutan dan berkualitas memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia, serta mendukung perekonomian.

Tabel 2.5 Produksi Hasil Ternak Kabupaten Mojokerto

Komoditas	Produksi Hasil Ternak	
	Produksi Tahun (Ton)	
	2021	2022
Daging Sapi	988 366	986 244
Daging Unggas	20 997 029	25 049 860
Telur Ayam	9 566 981	8 482 242
Telur Unggas lain	2 360 073	2 226 228
Susu Sapi	4 364 253	3 211 680

Sumber : Satudata Palapa

Gambar 2.3 Grafik Produksi Hasil Ternak (Ton) di Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan data yang diperoleh, Hasil ternak yang paling banyak diproduksi adalah dari hewan unggas. Sedangkan produk dari sapi merupakan produksi hasil ternak yang paling rendah. Hal ini merupakan penyesuaian dari pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih banyak mengonsumsi produk dari unggas (daging dan telur unggas).

➤ **Bidang Gizi**

Gizi yang cukup dan seimbang memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pentingnya gizi bagi manusia terlihat dalam beberapa aspek yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, daya tahan tubuh, dan kinerja kognitif. Gizi yang mencukupi memberikan bahan bakar dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nutrisi yang tepat memberikan dukungan yang optimal bagi perkembangan fisik, otak, dan sistem organ, terutama pada masa anak-anak dan remaja. Gizi yang baik juga berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Asupan nutrisi yang seimbang, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, membantu menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari infeksi, serta mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas.

Selain itu, gizi yang cukup juga berdampak pada daya tahan tubuh. Nutrisi yang memadai memperkuat sistem kekebalan tubuh, memungkinkan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit dengan lebih efektif. Kinerja kognitif dan kecerdasan juga dipengaruhi oleh gizi yang baik. Asupan nutrisi yang tepat memainkan peran penting dalam perkembangan otak, meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, memori, dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Dalam keseluruhan, pentingnya gizi bagi manusia tidak dapat diabaikan. Dengan asupan nutrisi yang memadai dan seimbang, manusia dapat mencapai potensi optimalnya, menjaga kesehatan, serta menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.



1. Stunting

Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan. Gizi yang tidak mencukupi, terutama dalam hal asupan energi, protein, dan mikronutrien, dapat menyebabkan stunting. Keterkaitan antara stunting dan gizi terletak pada pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Gizi yang baik memainkan peran utama dalam membentuk struktur dan fungsi tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Ketidacukupan gizi, terutama pada masa kritis pertumbuhan, dapat menghambat pertumbuhan linier tubuh, sehingga mengakibatkan stunting. Stunting pada anak dapat berdampak jangka panjang, termasuk penurunan kapasitas belajar, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit kronis di kemudian hari.

Tabel 2.6 Data Stunting Pada Balita Di Kabupaten Mojokerto

Puskesmas	2021			2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Puskesmas Sooko	145	77	222	77	79	156
Puskesmas Trowulan	75	53	128	6	1	7
Puskesmas Tawang Sari	34	23	57	33	32	65
Puskesmas Puri	44	36	80	17	18	35
Puskesmas Gayaman	18	14	32	33	21	54
Puskesmas Bangsal	15	13	28	10	10	20
Puskesmas Gedeg	69	68	137	17	19	36
Puskesmas Lespadangan	95	85	180	27	18	45
Puskesmas Kemlagi	51	34	85	35	19	54
Puskesmas Kedungsari	59	55	114	22	15	37
Puskesmas Kupang	98	81	179	18	15	33
Puskesmas Jetis	16	14	30	14	11	25



Puskesmas Dawarblandong	95	85	180	15	12	27
Puskesmas Mojosari	3	0	3	25	11	36
Puskesmas Modopuro	7	3	10	7	4	11
Puskesmas Pungging	31	29	60	32	28	60
Puskesmas Watukenongo	26	15	41	6	4	10
Puskesmas Ngoro	46	26	72	11	11	22
Puskesmas Manduro	18	12	30	11	11	22
Puskesmas Dlanggu	66	57	123	45	32	77
Puskesmas Kutorejo	52	40	92	11	13	24
Puskesmas Pesanggrahan	29	14	43	6	6	12
Puskesmas Pacet	37	31	68	30	20	50
Puskesmas Pandan	96	61	157	71	48	119
Puskesmas Trawas	130	95	225	64	41	105
Puskesmas Gondang	45	33	78	4	5	9
Puskesmas Jatirejo	14	22	36	13	15	28
Total	1414	1076	2490	660	519	1179

Sumber : Satudata Palapa

Data diatas merupakan data rekap stunting pada tahun 2021 dan Desember 2022. Berdasarkan data tersebut, puskesmas Pandan, Trawas, dan Sooko memiliki jumlah stunting yang cenderung lebih tinggi dari puskesmas lain. Data diambil dari pengukuran Balita (Bawah Lima Tahun) pada setiap puskesmas di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2.7 Sebaran Stunting di Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Diukur	Stunting	%
1	Mojoanyar	2710	71	2.62
2	Trawas	1316	33	2.51
3	Gedeg	2800	67	2.39
4	Gondang	2183	48	2.20
5	Sooko	4024	86	2.14
6	Dlanggu	3261	49	1.50
7	Pacet	2413	33	1.37



8	Kemlagi	3454	36	1.04
9	Jatirejo	2887	27	0.94
10	Mojosari	3205	24	0.75
11	Trowulan	4640	32	0.69
12	Ngoro	4254	24	0.56
13	Jetis	4911	26	0.53
14	Puri	2898	13	0.45
15	Kutorejo	4363	19	0.44
16	Pungging	3993	17	0.43
17	Dawarblandong	2362	10	0.42
18	Bangsal	2612	4	0.15
Jumlah		58286	619	1.06

Data tersebut merupakan data persebaran serta perbandingan Stunting pada puskesmas di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase stunting lebih tinggi daripada daerah lain.

2. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pola makan seseorang berdasarkan konsumsi berbagai kelompok pangan. Skor PPH ini didesain untuk mempromosikan pola makan sehat yang terdiri dari beragam makanan bergizi. Skor PPH menggunakan skala 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik kualitas pola makan seseorang. Skor ini diberikan berdasarkan konsumsi pangan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein nabati dan hewani, serta lemak sehat. Dengan menggunakan Skor PPH, individu dapat memiliki panduan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pola makan mereka, dengan fokus pada asupan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit kronis, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.



Tabel 2.8 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Kelompok Bahan Pangan	Energi (kkal/kapita)	% Energi Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AK E	Skor PPH	Skor Maks
Padi-padian	2142	48.5	89.3	0.5	24.3	44.6	25	25
Umbi-umbian	601	13.6	25	0.5	6.8	12.5	2.5	2.5
Pangan Hewani	875	19.8	36.5	2	39.6	72.9	24	24
Minyak dan Lemak	309	7	12.9	0.5	3.5	6.4	5	5
Buah/Biji berminyak	0	0	0	0	0	0	0	1
Kacang-Kacangan	300	6.8	12.5	2	13.6	25	10	10
Gula	10	0.2	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	2.5
Sayuran dan Buah	161	3.6	6.7	5	18.2	33.5	30	30
Lain-lain	17	0.4	0.7	0	0	0	0	0
	4415	100	184		106.1	195.1	96.7	100

Sumber : Satudata Palapa

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Mojokerto memiliki skor pola pangan harapan yang relatif tinggi yaitu sebesar 96.7. Berdasarkan data tersebut, kabupaten Mojokerto dapat dikatakan sudah cukup memenuhi pola pangan yang cukup baik. Tetapi, konsumsi gula masih kurang memenuhi untuk dianggap memiliki pola sesuai pola pangan harapan.



BAB III

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama yang ingin diwujudkan dengan adanya perbaikan pangan dan gizi melalui pendekatan multi sektor adalah terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif dan berdaya saing. Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mojokerto meliputi empat tujuan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, bergizi Seimbang dan Aman
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Tujuan akhir dari pembangunan pangan dan gizi di daerah adalah terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM), cerdas, sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal ini selaras dengan amanat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.Ppn/Hk/10/2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021-2024.

B. Ruang Lingkup

Upaya penajaman aksi untuk mencapai target pembangunan pangan dan gizi yang telah tertuang dalam RPJMN & RPJMD Kabupaten Mojokerto dapat difokuskan Dalam RADPG Kabupaten Mojokerto. Tujuan strategi dan aksi penajaman ini dimaksudkan untuk menggerakkan perbaikan sistem pangan dalam mewujudkan pelayanan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang, aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman



3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan melibatkan intervensi multisektor terintegrasi. Tidak hanya itu, dalam hal penguatan sistem ketahanan pangan dan gizi RAD-PG memfokuskan untuk melibatkan kelompok rentan dengan segala bentuk malnutrisi untuk mengatasi ketimpangan yang ada saat ini.

C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

RAD-PG Kabupaten Mojokerto berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMN dan TPB/SDGs dan juga diselaraskan dengan RPJMD daerah dalam kurun waktu pembangunan lima tahun kedepan. RAD-PG sendiri menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan stunting. Dalam dokumen rencana aksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 124 Tahun 2021 telah mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi. Berikut merupakan perbedaan konsep Penyusunan RAD-PG dengan periode sebelumnya

Tabel 3.1 Perbedaan Konsep Penyusunan RAD-PG Dengan Periode Sebelumnya

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Penyusunan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang sudah ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD



Tujuan dan Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrument koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrument koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsive gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek Ketahanan	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aksi tidak hanya diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitive gizi, tetapi juga peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi ke gawatdaruratan seperti COVID 19

Sumber : Pedoman Penyusunan RAD-PG

1. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah Dalam Situasi Darurat

Gizi juga berperan penting saat terjadinya situasi darurat, antara lain bencana alam, kebakaran, dan atau pandemic Covid-19 yang saat ini terjadi. Dampak akibat bencana umumnya secara fisik adalah rusaknya atau terhambatnya berbagai sarana dan prasarana fisik seperti pemukiman, bangunan fasilitas pelayanan umum, dan sarana transportasi. Namun demikian, dampak yang lebih besar adalah timbulnya permasalahan kesehatan, termasuk gizi pada kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Adapun Peran Gizi Antara lain:

1. Sosialisasi pedoman penanganan Gizi Dalam penanggulangan bencana



2. Melakukan Kajian Kesehatan - Gizi
3. Menyediakan buffer stock kelompok rentan
4. Menyusun Dan merencanakan kebutuhan dapur umum serta kelompok rentan
5. Menyelenggarakan dapur darurat khusus Bayi Dan Balita
6. Surveilans Gizi
7. Melakukan pengawasan bantuan kebutuhan Pangan Umum maupun khusus
8. Membuat standar porsi Dan Gizi pengungsi

2. Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Pengarusutamaan gender sudah masuk dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Kesetaraan gender menjadi pembahasan penting untuk masyarakat, dimana pengertiannya adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan

Gender dalam penyediaan konsumsi terutama di rumah tangga menjadi hal menarik yang perlu dikaji. Sudah menjadi stigma masyarakat bahwa ibu yang menjadi center dalam kegiatan dapur mulai dari merencanakan menu hingga memastikan semua anggota keluarganya makan, bahkan sampai menyuapi anak. Padahal kita kenal juga chef banyak yang seorang laki-laki dimana keuletan dalam pengolahan masakan hingga penyajian yang menarik menjadi factor penting dalam mengonsumsi makanan. Sehingga menjadi penting bahwa peran keluarga, yakni ibu dan ayah, seharusnya memberikan peran penting untuk konsumsi yang bergizi seimbang dan beragam juga aman di keluarga, termasuk kelompok rentan yang ada di dalamnya. Pesan ini juga tentu penting untuk disebarkan ke masyarakat.



BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Strategi dan Aksi

Organisasi kesehatan dunia atau WHO dan Organisasi Pangan Dunia atau FAO merekomendasikan pentingnya integrasi sistem pangan dan orientasi kepada penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan hingga tingkat rumah tangga. Terdapat enam aksi yang bisa dilakukan yaitu:

1. Sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan untuk konsumsi makanan yang bergizi
2. Integrasi pangan dan sistem kesehatan untuk menjamin akses pelayanan esensial
3. Jaminan sosial dan pendidikan gizi
4. Investasi untuk perbaikan gizi
5. Lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemenuhan gizi pada semua sasaran
6. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas sistem pangan dan gizi

Berdasarkan rekomendasi tersebut, disusun tujuan strategis dan aksi di bidang pangandan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai berikut :

SRATEGI	AKSI
TS 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	
	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam
	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota



1. Peningkatan produksi pangan yang beragam;	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan
	Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat
2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerja sama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan
	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan
3. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/ kab/kota
	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)
4. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss
	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait
	Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss melalui peningkatan kapasitas
	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss
5. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan
TS 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	



1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan
	Meningkatkan jenis komoditas pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal
2. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan
	Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan
3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan
4. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)
	Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT
	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarjinalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)
5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing
6. Penumbuhan kemandirian	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal



pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1- 3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi
7. Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah
	Mengembangkan kerjasama industri start-up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce
TS 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	
1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya
2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan
3. Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Meningkatkan kegiatan advokasi penganeekaragaman konsumsi pangan
	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik
	Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)
	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas



	<p>Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%</p> <p>Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama /politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku</p>
	<p>Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA</p> <p>Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini</p> <p>Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)</p> <p>Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak</p>
4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	<p>Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji</p> <p>Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah</p>
5. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan	<p>Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota</p>



<p>mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan</p>	<p>Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani</p>
<p>6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis Pangan lokal</p>	<p>Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal</p>
<p>7. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat</p>	<p>Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024</p> <p>Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi</p> <p>Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan</p> <p>Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan</p> <p>Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat</p> <p>Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM</p>



	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa
	Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah
	Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-19
8. Pengendalian pemborosan pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste
	Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect
	Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste
	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste
9. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (Fortifikasi) pada pangan tertentu	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada
	Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi
	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi
	Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku
	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru



10. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat"/healthy choice pangan siap saji
TS 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	
1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting
	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)
	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADPG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah
	Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.
3. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah
	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga
	Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini
	Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku



4. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi
5. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste termasuk inovasi smart farming
	Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia
	Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro
	Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota
	Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan
	Menyelenggarakan forum nasional penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala
	Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga
	Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar



Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia

B. Pengorganisasian

Program-program intervensi pemantapan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan secara collaborative actions dari lembaga-lembaga yang terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Forum dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

C. Peran Sektor Non-Pemerintah

Penanganan masalah kesehatan dan gizi meliputi ketersediaan, keterjangkauan, ketahanan pangan dapat dimulai dari akses produksi, distribusi, pengolahan, konsumsipangan dan gizi dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi standar ketahanan pangan dan gizi serta kecukupan gizi yang dianjurkan sangatlah diperlukan keterlibatan stakeholder pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan industri, tokoh masyarakat, LSM peminat pangan dan gizi disemua lini akan sangat menunjang keberhasilan penanganan masalah pangan dan gizi di kabupaten mojokerto.



D. Pembiayaan

Anggaran kegiatan program Aksi Daerah Pangan dan Gizi diharapkan dapat diperoleh dan atau didanai anggaran pendapatan daerah dan dari sumbangan sumbangan yang bersifat tidak mengikat.



BAB V

PEMANTAUAN EVALUASI DAN LAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, perlu ditetapkan target atau output yang ingin dicapai, siapa saja yang berperan, apa saja input dan proses yang harus dilakukan. Namun agar lebih terukur dipilih beberapa indikator kinerja utama untuk setiap OPD yang akan terus dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Indikator diperoleh dengan memilih indikator kerjanya yang berasal dari RPJMD maupun Renstra SKPD atau kegiatan lainnya yang relevan terhadap upaya perbaikan gizi dan berkaitan dengan output dan outcome yang ingin dicapai. Indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya output dan outcome dari RAD-PG 2023-2028.

B. Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh BAPPEDA. Adapun Pelaporan dan kegiatan monev dilakukan secara periodik di setiap tahunnya. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah :

1. Pendahuluan
2. Indikator Dan Capaian
3. Kendala pencapaian Sasaran Dan mekanisme penyelesaiannya
4. Rencana tindak lanjut Dan perencanaan Capaian tahun berikutnya
5. Penutup



BAB VI

PENUTUP

Kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi secara sistematis dan menyeluruh merupakan upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Penyusunan RAD-PG ini dilakukan melalui kajian multisektor untuk menghasilkan dampak yang diharapkan, yakni menciptakan sumber daya manusia yang sehat, produktif bagi percepatan pembangunan. Tidak hanya itu, diharapkan dengan adanya RAD-PG maka agenda prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terlasana dengan baik.

Dokumen ini menjadi instrument penting dalam menjalankan pembangunan bidang pangan dan gizi, terutama dalam upaya penurunan stunting. Aspek kebutuhan pangan dan gizi menjadi fokus utama dalam perencanaan ini. Oleh sebab itu, dokumen yang tersusun ini agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.



Lampiran 1. Matriks Aksi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2028

NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
KETERSEDIAAN													
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Terbentuknya sentra produksi pangan lokal	1 Lokasi	1 Lokasi	PENGELOLAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Pembangunan jalan produksi	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, Disperindag, DPMD	
			Terbentuknya sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hewani	10 Lokasi	10 Lokasi			2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, DPMD	pemanfaatan pelaku forum umkm
			Terbentuknya sentra produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura (Sayur dan buah)	10 Lokasi	10 Lokasi			3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Diskopum, Disperindag	
								4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Monitoring Lembaga Usaha Pemberdayaan Masyarakat	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, Disperindag, DPMD	
								5 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Pembuatan Roadmap kemandirian pangan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, Disperindag, DPMD	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan dan Penyediaan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, Disperindag, DPMD	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH	
				2023	2024									
								2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi, kerbau	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda, Diskopum, Disperindag, DPMD	
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal	Persentasi kenaikan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal	34%	34.01 %	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Pengembangan Bibit dan Ternak	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dispari, DPMD, Dinas kesehatan		
								2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Buffer Stock, Penangkaran dan Pengadaan bibit dan ternak	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag; Dinas kesehatan	
								3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengadaan Bibit bakalan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag; Dinas kesehatan	
							2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Penyediaan benih/bibit bahan pakan ternak	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag; Dinas kesehatan	
							3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag; Dinas kesehatan	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan sapsras budidaya	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag; Dinas kesehatan		



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
								Kabupaten/Kota					
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Pengadaan sarana dan Prasarana alat tangkap ikan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag, Dinas kesehatan	
			Terpenuhi gizi keluarga yang sehat dan beragam	10 Lokasi	10 Lokasi	PROGRAM BUDI KASAMBER (BUDI DAYA IKAN DAN SAYURAN DALAM EMBER)	Pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui gerakan tanam di lokus stunting				tim pkk	DPMD, Dinas Pangan dan perikanan	forum csr
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentasi Kelurahan fokus lokasi penurunan stunting yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan baik melalui P2L dan program daerah.	20%	80%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Penyediaan Informasi Harga dan Bahan Pangan dan Makanan	Informasi Harga dan Bahan Pangan dan Makanan	Analisis NBM	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dispari, Disperindag, Dinas kesehatan	forum csr
								2 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Survey Harga pasar	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dispari, Disperindag, Dinas kesehatan	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Jumlah kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan bagi pemenuhan konsumsi pangan keluarga yang B2SA di Kelurahan lokus penurunan <i>stunting</i> dan <i>urban farming</i> .	2 Kelompok	8 Kelompok	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan KWT	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan		
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dinas kesehatan	Diskopum; Dispari	
							2 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
			Jumlah Kelurahan pangan aman yang dibina				3 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	
			Terbentuknya kerjasama OKKPD dengan BPOM untuk keamanan pangan segar				4 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan					2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Sosialisasi	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
								2 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
								3 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
								4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
			Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Unggas	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
								2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kab/Kota	Jumlah Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan Sarana IB	Pengadaan Sarana IB	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
								3. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Pengawasan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Terbentuknya Tim KoorDinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di retailer dan pasar tradisional	1 Tim KoorDinasi	1 Tim KoorDinasi	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Penerbitan Sertifikat Produksi Industri Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pelaksanaan Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPPIRT	Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	2. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pengawasan Sarana IRTP, Pengawasan Kualitas Produk IRTP dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	Dinas kesehatan	Diskopum, Disperindag	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan	Persentase kenaikan cadangan pangan pemerintah daerah	60%	60%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	KoorDinasi	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	setda	
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di Kelurahan (LPMDes)	Persentase Kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Kelurahan (LPMDes)	35%	65%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	CPP	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Pemeliharaan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Monev	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	
								2 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan smart farming untuk mencegah food loss			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	usaid-erat, tanoto foundation



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam untuk mengakses informasi mengenai harga dan komoditas yang laku/tidak laku di pasar			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	
			Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan untuk memahami kalender pertanian setiap daerah yang fokus pada diversifikasi pangan/penataan pola tanam komoditas untuk mencegah overproduction di waktu yang sama			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	
2	KETERJANGKAUAN												
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Terselenggaranya gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan/atau Rumah Pangan Kita Bulog	4 Kali	10 Kali	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kominfo	
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Jumlah UMKM/Koperasi/BU MDes sektor pangan yang dibina untuk mengembangkan produk berbahan dasar pangan lokal untuk peningkatan gizi kelompok rawan	150 UMKM	150 UMKM	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	1. Pemberdayaan Usaha Mikro Yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudian perizinan, penguatan kelembagaan dan koorDinasi dengan para pemangku kepentingan	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku UMKM	Pelatihan Kewirausahaan Vokasional Berupa Pengembangan Usaha berdasarkan potensi lokal daerah	dinkop, umkm, perindustrian dan perdagangan	Dinas kesehatan	keterlibatan csr
2.4	Pengembangan sistem jaring pangan sosial dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Persentase e-warung yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum	100%	100%	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya ekonomi keluarga penerima bantuan sosial	Sosialisasi, Monitoring & Rapat Evaluasi penerima bantuan sosial (BPNT)	Dinas sosial	Dispari, DP2KBP2, DPMD	
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerjasama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	5 Ton	5 Ton	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan	Penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, DPMD	
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	1. KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab/Kota	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Bintek Kerawanan Pangan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, DPMD	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
2.6	Pemumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat Kelurahan dalam mengolah pangan lokal				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan KWT	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, DPMD	
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Pengembangan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Penyusunan Peta Distribusi Logistik Komoditas Bahan Pokok			Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	
							2 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan KoorDinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	
							3 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Disperindag	
3	PEMANFAATAN												



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
3.1	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Tersedianya portal Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, Disperindag	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Dinas kesehatan	Dispari	
			Tersedianya data skor PPH Konsumsi Pangan	83%	86%			2 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Memaksimalkan pemanfaatan peta rawan pangan	Jumlah kecamatan rentan pangan prioritas 1-3 yg mendapatkan pendampingan dalam pemanfaatan informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1 Penyusunan Peta Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen hasil koorDinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	Analisis Peta Kerawanan Pangan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	DPMD	
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang,	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
	dan Aman (B2SA) sejak usia dini												
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	1 Kegiatan	2 Kegiatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gerakan Aksi Bergizi Selasa Berseri Tanpa Anemia (SARITA SANTIK)	Dinas kesehatan	Dispari, Diskominfo	
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Terlaksananya kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)	2 Kegiatan	10 Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembagian hasil olahan ikan, penyuluhan tentang pentingnya konsumsi ikan, lomba cipta menu berbahan dasar ikan.	Dinas Pangan dan Perikanan	Dispari	
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Kelurahan (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Kelurahan (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tim Penurunan Stunting	Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting	Dinas kesehatan	DP2KBP2	tanoto foundation dan yayasan cipta



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Peningkatan kapasitas pemda dalam implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku PPS yang berbasis pada tokoh kunci	Meningkatnya kapasitas pelaksana PPS tingkat kabupaten/kota	35 Kecamatan	35 Kecamatan	PROGRAM MITRA					tanoto foundation dan yayasan cipta	Bappeda	tanoto foundation dan yayasan cipta
				36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kader Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting	Dinas kesehatan	DPMD	
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan yang dilibatkan dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	35 Kecamatan	35 Kecamatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia 15-59 Tahun	Skrining Faktor Risiko PTM pada Masyarakat	Dinas kesehatan	DP2KBP2	
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah KoorDinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Gerakan sadar konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbagnag dan Aman (B2SA) di Daerah Stunting di Kab/Kota	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, Bappeda	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah lokasi kampanye langsung atau digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku makan B2SA	0	1 Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Dinas Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan, Bappeda	
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah tim penggerak PKK di Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas/pendampingan perempuan (untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak)	36 Tim Penggerak PKK	36 Tim Penggerak PKK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pokjnal Posyandu, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, Forum Kader Kabupaten	Pertemuan koorDinasi, sosialisasi dalam rangka meningkatkan dukungan mitra penggerakka n masyarakat dan pelaksanaan posyandu	Dinas kesehatan	DP2KBP2, DPMD	
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	0	5 Sekolah	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	Kelompok	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas kesehatan; Dinas pendidikan, Disbudporapar	
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Tersedianya konsep isi piringku dengan pangan lokal	1 Konsep	1 Konsep	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Gerakan Aksi Bergizi Selasa Berseri Tanpa Anemia (SARITA SANTIK)	Dinas kesehatan	Dinas Pertanian, Dispari	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
	(di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan												
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif termasuk MP- ASI	Tersedianya/ditetapkannya regulasi mengenai ASI Eksklusif	1 Perbup	1 Perbup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersusunnya Perbup	Penyusunan Draft Perbup	Dinas kesehatan	setda	
			Jumlah balita kekurangan gizi yang mendapatkan MP-ASI berbahan dasar pangan lokal	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
			Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT berbahan dasar pangan lokal	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ibu Hamil	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024	Tersedianya komitmen pencapaian cakupan target sasaran suplementasi gizi sebesar 90 % pada tahun 2024	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tenaga Pelaksana Gizi (TPG)	Rapat Koordinasi Program Gizi	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat pemberian bubuk tabur gizi	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Jumlah puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam tata kelola pelayanan gizi bagi kelompok rawan dalam situasi pandemi	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Gizi	Bintek pada Puskesmas Terkait Surveilans Gizi dan Intervensi Gizi	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang datang ke puskesmas/FKTP untuk kunjungan sakit maupun sehat	Deteksi dini faktor risiko PTM, monitoring, melakukan pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana, melakukan rujukan kasus dan menerima rujuk balik	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di Kelurahan	Jumlah puskesmas yang aktif melakukan kampanye Gerakan Lawan Obesitas (GENTAS)	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk usia 15 Tahun ke atas	Posbindu PTM	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di Kelurahan	Jumlah puskesmas melakukan pendampingan Kelurahan untuk kegiatan Posbindu	36 Puskesmas	36 Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	358 posbindu PTM	Posbindu PTM	Dinas kesehatan	Tim PKK, Pendamping PKH, Penyuluh KB	
3.8	Pengendalian pemborosan pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dinas lingkungan hidup	Dinas kesehatan, Dispari	
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	Dinas lingkungan hidup	Dinas kesehatan, Dispari	
4	KELEMBAGAN												



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
4.1	Penguatan koorDinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koorDinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koorDinasi percepatan penurunan stunting	Tersedianya forum untuk koorDinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor	1 Tim Forum KoorDinasi RAD PG	1 Tim Forum KoorDinasi RAD PG	KoorDinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 KoorDinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	1 KoorDinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Perbup RAD-PG	Penyusunan Dokumen RAD PG Kota Mojokerto 2023-2028 Penetapan Perbup, Sosialisasi Perbup RAD-PG, Pemantauan dan Evaluasi	Bappeda	semua opd yang terlibat dalam forum rad pg	
4.2	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koorDinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan koorDinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah)			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1 KoorDinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil KoorDinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	Bappeda	Dispari, Dinas kesehatan	
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.	Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku dalam mencegah food waste dan food loss		1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	1 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemba ga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	Dinas lingkungan hidup	Bappeda, Dispari	
					2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA KELURAHAN DAN KELURAHAN	1 KoorDinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah	Dokumen	DPMD	Dispari, Dinas lingkungan hidup	



NO	TUJUAN STRATEGIS	AKSI	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR	RINCIAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OPD PENDUKUNG	SEKTOR NON PEMERINTAH
				2023	2024								
									kerja kecamatan				
								2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Laporan DPMD	Dispari, Dinas lingkungan hidup	
4.3	Penguatan dimensi gender dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah OPD bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkatkan kapasitas PUG/PPRG-nya	64 OPD	64 OPD	PROGRAM PENGARUSU TAMBAHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	64 Perangkat Daerah	Rapat KoorDinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Input data GAP/GBS	dp2kbp2	semua opd	
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	36 Organisasi	36 Organisasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kelurahan	Pembinaan P2WKSS	dp2kbp2	semua badan/Dinas	
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Tersedianya regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	1 Draft	1 Regulasi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana	1 Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2D Kawasan Pertanian Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perjadin	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan	Bappeda	



Lampiran 2. Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026

STRATEGI	AKSI	KELUARAN AKSI / INDIKATOR KINERJA	TARGET				TARGET RPJMN 2020-2024	PJ
			2023	2024	2025	2026		
TS 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman								
1. Peningkatan produksi pangan yang beragam;	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Terbentuknya Sentra Produksi Pangan Lokal Unggulan					Target 2024, ketersediaan: - Beras 46,8 ton	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab/kota	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Tanaman Pangan	2.5%	5.0%	7.5%	10.0 %	- Protein hewani 2,9 juta ton - Daging 4,9 ton	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Ternak	2.5%	5.0%	7.5%	10.0 %	- Jagung 35,3 ton - Umbi-umbian	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Buah-buahan	2.5%	5.0%	7.5%	10.0 %	25,5 ton - Buah-buahan 5,7% - Peningkatan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2.5%	5.0%	7.5%	10.0%	produksi sayuran 3,1% - Penggunaan benih bersertifikat 80%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Persentase Kelurahan Fokus Lokasi Penurunan Stunting yang Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan baik melalui P2L dan program daerah						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan membangun demplot urban farming						DPRKP2



	Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah Desa/kelurahan yang melakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap kebun bibit daerah (KBD) secara konsisten untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan, balai benih/bibit bersertifikasi untuk program P2 L dan urban farming						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
2. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Desa/kelurahan yang telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki program Pengawasan Keamanan Pangan Daerah di retailer dan pasar tradisional					Target 2026: - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 85-95% - Persentase makanan yang memenuhi	Dinas Pangan dan Perikanan
		Jumlah desa/kelurahan yang menerima intervensi						Dinas Pangan dan Perikanan



		program desa pangan aman					syarat 86%	
	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Jumlah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di Kota Bandung yang telah diverifikasi dan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) oleh Pemerintah Daerah						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pangan segar asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
3. Pengelolaan cadangan pangan	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/kab/kota	Persentase kenaikan cadangan pangan	2.5%	5.0%	7.5%	10.0%	Target 2024, ketersediaan: - Beras 46,8 ton	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Persentase desa waspada dan rawan pangan yang mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)					- Protein hewani 2,9 juta ton	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
4. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food loss)	Mengembangkan pertanian modern (smart farming) untuk mengurangi food loss	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengurangi food loss/kehilangan hasil saat panen					Target 2026: - Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi untuk mengakses informasi mengenai harga komoditas pangan						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



		Persentase kelompok tani yang mendapatkan pendampingan untuk memahami kalender pertanian setiap daerah yang fokus pada diversifikasi pangan/penataan pola tanam komoditas untuk mencegah overproduction di waktu yang sama						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian food loss melalui peningkatan kapasitas	Jumlah industri pangan skala kecil/UMKM yang didampingi/ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka pengendalian food loss						Diskopum
	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan	Tersedianya data food loss setiap tahun						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



	penyimpanan dalam mengendalikan food loss	Jumlah kelurahan/desa yang memiliki pangkalan data yang memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss						
5. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada	Tersedianya peta jalan biofortifikasi di Indonesia					Target 2026: - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan pokok (selain padi)					bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% - Luas lahan produksi beras biofortifikasi 200.000 ha padi - Jumlah varietas unggul	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



							tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 30 varietas unggul tanaman baru	
TS 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman								
1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai early warning system (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan/atau OPD Daerah					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog					Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



		Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen					Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Meningkatkan jenis komoditas pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Persentasi TTI center yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal					Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentasi Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein hewani/nabati, buah, sayur dan pangan lokal					Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



2. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga Pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan baik nasional maupun daerah (provinsi dan kab/kota)					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Tersedianya panduan teknis panel harga pangan komoditas pangan pokok/strategis termasuk sayur dan buah					- Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan	Membina UMKM/Koperasi/BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Persentase UMKM/Koperasi/BUMDes sektor pangan yang dibina untuk mengembangkan produk berbahan dasar pangan lokal untuk peningkatan gizi kelompok rawan					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



							- Daging Ayam <10%	
4. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras bifortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Tersedianya pedoman program BPNT yang mencakup sosialisasi beras fortifikasi dan biofortifikasi sebagai bahan pangan yang perlu disediakan					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/BPNT	Persentase e-warong yang menyediakan jenis pangan yang beragam sesuai dengan Pedum					Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Sosial
	Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarjinalkan (perempuan,	Jumlah e-warong yang menyediakan suplemen gizi dalam program bantuan sosial untuk kelompok marginal (perempuan, gelandangan, fakir miskin,						Dinas Sosial



	gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	anak jalanan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)						
5. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Persentase kelurahan/desa penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



6. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Tersedianya kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pengolahan pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20%	DPMD
	Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1- 3 dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	Persentasi desa/kelurahan rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi					- Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
7. Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan supply chain ecosystem berdasarkan kondisi daerah	Jumlah provinsi yang mengembangkan sistem informasi logistik pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan antar kabupaten/kota					Koefisien variasi harga pangan nasional - Beras <5% - Cabai < 20%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



	Mengembangkan kerjasama industri start-up dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur e-commerce	Persentase kelompok tani yang difasilitasi mendapatkan jaringan distribusi pangan melalui platform penjualan online/e-commerce					- Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
TS 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)								
1. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Jumlah kelurahan/desa yang melakukan analisis dan memanfaatkan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)					Target 2026: Prevalensi PoU 5% Prevalensi Stunting 14%	Bappeda
		Jumlah kelurahan yang menyediakan dan menggunakan data skor PPH ketersediaan					-disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; Prevalensi Wasting 7% -disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



							Prevalensi Obesitas >18 tahun 21,8% - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	
2. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Persentasi desa/kelurahan rentan pangan prioritas 1-3 yg mendapatkan pendampingan dalam pemanfaat informasi peta rawan pangan untuk pengembangan kebijakan ketahanan pangan di desa/kelurahan					-Prevalensi FIES 4% (2026)	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
3. Edukasi pola konsumsi pangan perseorangan dan	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)					Target 2026: Skor PPH 95,2% Prevalensi POU 5%	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini	Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kampanye "isi piringku menu khas pangan lokal" di wilayah melalui berbagai kanal komunikasi					Prevalensi FIES 4% Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun	Dinkes
	Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah provinsi yang melaksanakan kampanye gerakan gemar makan ikan (gemarikan)					Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun	
	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Tersedianya dokumen kebijakan yang mengadopsi pesan kunci PGS ke dalam kurikulum dasar, menengah, dan atas					un Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun un - AKE 2.100 kkal/kapita/hari	Dinas Pendidikan



	Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%					AKP 57 g/kapita/hari	Dinkes
	Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama /politik/selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah jangkauan kampanye digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/ seleb gram lokal untuk perubahan perilaku makan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)						Diskominfo



Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA	Tersedianya platform rujukan informasi jurnalis dan media dalam rangka mendukung komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA						Bappeda
Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi perempuan dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini						Dinkes
Melakukan orientasi agent of change pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kelurahan yang melaksanakan orientasi agent of change PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik						Dinkes



	Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Jumlah tim penggerak PKK (kabupaten/kota) yang mendapatkan peningkatan kapasitas/pendampingan perempuan (untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak)						DP2KBP2
4. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Jumlah kelurahan yang melakukan pembinaan produsen pangan olahan industri rumah tangga dan siap saji berskala kecil terkemas sesuai regulasi terkini yang berlaku terkait pencantuman informasi kandungan GGL					Target 2026: Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun 21,8% dijelaskan terpisah berdasarkan	Dinas Pangan dan Perikanan
	Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah kelurahan yang melaksanakan sosialisasi tentang Keamanan dan mutu Pangan Jajanan Anak					jenis kelamin - Persentase makanan memenuhi	Dinas Pangan dan Perikanan



		Sekolah					syarat 86%	
dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan isi piringku dengan pangan lokal					Target 2026: Skor PPH 95,2% - Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun	Dinkes
	Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Tersedianya dokumen peta jalan diversifikasi pangan					Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan



6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Membina Desa/Kelurahan untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif	Jumlah kelurahan yang menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif					Target 2026: - Prevalensi stunting 14% disajikan	Dinkes
	Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Jumlah balita kekurangan gizi yang mendapatkan MP-ASI berbahan dasar pangan lokal					terpilah berdasarkan jenis kelamin - Prevalensi	Dinkes
		Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT berbahan dasar pangan lokal					wasting 7% disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinkes
7. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A)	Persentasi kelurahan yang telah menandatangani komitmen pencapaian cakupan target sasaran suplementasi gizi sebesar 90 % pada tahun 2026					Target 2026: - Prevalensi stunting 14% disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin - Prevalensi wasting 7%	DP2KBP2



	untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2024						disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	
	Mendorong pemanfaatan RUTF (Ready to Use Therapeutic Food) berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi	Tersedianya produk RUTF berbahan dasar pangan lokal (produksi dalam negeri) yang terstandarisasi						
		Tersedianya rekomendasi kebijakan pemanfaatan RUTF berbahan dasar pangan lokal (produksi dalam negeri) di Puskesmas						
	Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat pemberian bubuk tabur gizi						Dinkes



	6-59 bulan							
	Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Persentasi desa/kelurahan yang melaksanakan skema pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan						Dinkes
	Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Jumlah provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam tata kelola pelayanan gizi bagi kelompok rawan dalam situasi pandemi						Dinkes
	Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Jumlah kelurahan yang memiliki minimal 80% puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM sesuai standar						Dinkes
	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan	Persentase desa/kelurahan yang puskesmasnya melakukan pendampingan desa untuk kegiatan						Dinkes



	pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Posbindu						
		Persentase obesitas usia > 15 tahun yang dilaksanakan pengukuran deteksi dini PTM						Dinkes
	Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi/pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif pada perusahaan/sector swasta						Dinkes
8.	Pengendalian pemborosan pangan (food waste)	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi food waste	Jumlah kelurahan yang melakukan pelatihan bagi organisasi masyarakat (pemuda atau perempuan) dalam rangka penanganan limbah makananan melalui				Target 2026: -Prevalensi POU 5%	DLH



		gerakan 4R (reuse, reduce, recycle, replace) atau composting						
	Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect	Tersedianya platform untuk membantu distribusi pangan berlebih/ugly food/sisa makanan dalam mencegah terjadinya food loss						Disperindag
	Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste	Jumlah nota kesepahaman bersifat sukarela (vouluntary agreement) dengan produsen/industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan food waste						DLH
	Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses	Tersedianya data food waste setiap tahun						DLH



	produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food waste							
9. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (Fortifikasi) pada pangan tertentu	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia untuk perbaikan kebijakan yang ada	Tersedianya peta jalan fortifikasi pangan di Indonesia					Target 2026: Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100%	Dinkes
	Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi	Jumlah industri yang mengembangkan fortifikan dan kernel dalam negeri						Disperindag
	Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas K/L/D dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Jumlah desa/kelurahan yang mengimplementasikan pengawasan terhadap NSPK SNI wajib tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi						Disperindag



	Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Persentase produk minyak goreng sawit terdaftar yang beredar dan mengandung vit A dan/ atau pro Vitamin A						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentase tepung terigu terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
		Persentase garam konsumsi terdaftar yang beredar dan mengandung fortifikan sesuai persyaratan						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
10. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru	Tersedianya regulasi mengenai penetapan barang kena cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan						BPKAD
TS 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi								



1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan stunting	Tersedia dan berfungsinya forum koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor di Kabupaten Mojokerto					Target 2026: -Prevalensi stunting 14% disajikan terpilah	Bappeda
		Jumlah kelurahan/desa yang menetapkan forum untuk koordinasi pembangunan pangan dan gizi lintas sektor					berdasarkan jenis kelamin; -Prevalensi wasting 7% disajikan terpilah	Disperindag
	Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting (aksi #2)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan sosialisasi RAD-PG 2020-2026 serta pedoman penyusunan RAD-PG					berdasarkan jenis kelamin	Bappeda
	Memperkuat peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADPG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini						Bappeda



2. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non pemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi di pusat dan daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (nonpemerintah) dalam scaling up program pangan dan gizi.					Target 2026: Skor PPH 95,2 - AKE 2.100 kkal/kapita/hari AKP 57 gram/kapita/hari Konsumsi ikan	Dinkes
	Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, food loss dan food waste.	Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman (B2SA)					62 kg/kapita/tahun Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun Konsumsi	Bappeda
		Jumlah sektor swasta yang aktif dalam kampanye perubahan perilakupencegahan foodloss					protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun Konsumsi	Bappeda



		Edukasi masyarakat terkait penyiapan makanan, penyimpanan makanan, pengaturan porsi makan dan pengelolaan food waste sesuai kaidah keamanan dan mutu pangan					sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun Prevalensi stunting 14% disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
3. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Tersedianya modul/pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa/Kelurahan yang telah memuat aksi PUG dan PURG					Target 2026: - Skor PPH 95,2 - Prevalensi stunting 14% disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Bappeda
	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan	Jumlah kelurahan/desa yang memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga					- Prevalensi wasting 7% disajikan	Bappeda



	gizi keluarga	masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak)					terpilah berdasarkan jenis kelamin Target 2026:	
	Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah organisasi perempuan kabupaten bandung yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM					Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinkes
	Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Tersedianya pedoman berisi mekanisme pengawasan sosial yang dapat dilakukan oleh organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku						Dinkes



4. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah kelurahan/desa yang menetapkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)					- Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
	Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Tersedianya kajian produk inovasi pangan yang layak untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi					Pangan Berkelanjutan (LP2B) 100% Luas lahan Produksi beras biofortifikasi 200.000 ha - Ketersediaan beras 46,8 juta ton	Bappeda
5. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan food loss dan food waste	Jumlah publikasi mengenai inovasi smart farming dalam mencegah food loss yang diadopsi menjadi program pemerintah					Target 2026: - Prevalensi POU 5% -Prevalensi FIES 4% - Prevalensi	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Bappeda



ketahanan pangan dan gizi	termasuk inovasi smart farming						stunting 14% disajikan terpilah berdasarkan	
	Melakukan kajian gap analysis program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Indonesia	Tersedianya rekomendasi kebijakan terkait pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Kabupaten Mojokerto					jenis kelamin; - Prevalensi wasting 9% disajikan terpilah	Dinkes
	Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Tersedianya rekomendasi kebijakan terkait pemberian suplementasi multigizi mikro untuk ibu hamil					berdasarkan jenis kelamin - Konsumsi ikan 62 kg/kapita/tahun - Konsumsi	Dinkes
	Mengembangkan community based data untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota	Tersedianya dokumen hasil pemetaan masalah gizi mikro yang terintegrasi dengan pelaksanaan Riskesdas/Riskesnas					daging 14,6 kg/kapita/tahun - Konsumsi protein asal ternak 11	Dinkes



Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Jumlah publikasi riset ilmiah biofortifikasi di berbagai komoditi pangan (selain padi)					gram/kapita/tahun - Konsumsi sayur dan buah	Dinas Pendidikan, Bappeda
Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah hasil riset produk inovasi pemanfaatan pangan lokal yang diterapkan untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga					316,3 gram/kapita/tahun	Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Bappeda
Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah stunting yang sudah beredar	Jumlah publikasi riset ilmiah kajian literasi gizi pada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu						Dinas pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Bappeda

